

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan atas data penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor**

Kesimpulan mengenai rasio keserasian belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor selama periode 2020-2022 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Rasio belanja operasi mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, namun sedikit menurun di tahun 2022, dipengaruhi oleh perubahan dalam belanja barang dan jasa serta belanja pegawai dan hibah. Rasio belanja modal, sebaliknya, menurun pada 2021 sebelum meningkat lagi pada 2022, yang terkait dengan perubahan dalam belanja modal tanah dan belanja modal untuk infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan irigasi.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) selama periode tersebut tergolong sangat efektif, dengan realisasi pendapatan selalu melebihi target yang ditetapkan. Namun, efisiensi PAD masih belum optimal, meskipun ada penurunan ketidak efisienan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif yang konsisten, mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan.

Pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal juga menunjukkan fluktuasi, yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan anggaran

dan investasi modal Dinas. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi beberapa tantangan, terdapat peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan investasi modal yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.

## **2. Kinerja Non Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor**

Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor secara umum sudah memenuhi standar teknis dan administratif yang ditetapkan. Informasi yang disampaikan perlu lebih jelas dan mudah diakses. Prosedur pelayanan cukup mudah dipahami, namun masih bisa ditingkatkan. Waktu penyelesaian perbaikan umumnya cepat, meskipun terkadang terpengaruh oleh kondisi lingkungan.

Pelayanan gratis dan transparansi biaya perlu dijaga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kualitas infrastruktur dan pemeliharaan berkala perlu ditingkatkan. Kompetensi dan profesionalisme petugas baik, namun perlu terus dievaluasi. Sarana prasarana sudah memberikan dampak positif, namun beberapa area memerlukan perhatian lebih.

Penanganan pengaduan cukup baik, namun responsivitas dan efektivitas masih perlu ditingkatkan. Evaluasi sistem pengaduan penting untuk memastikan keluhan ditangani dengan baik dan tepat waktu.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

- a. Penelitian ini memberikan informasi tentang kinerja keuangan menggunakan rasio keserasian belanja, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi prioritas anggaran agar dapat dilakukan peningkatan, dan membantu pihak dinas membuat dan menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien.
- b. Penelitian ini memberikan informasi mengenai kinerja non keuangan dengan menilai kepuasan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 14 Tahun 2017 diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten Bogor.

### **2. Implikasi Praktis**

- a. Informasi terkait rasio keserasian belanja, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Bogor.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat Pemerintah Daerah terkait pengalokasian sumber daya dan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi dan monitoring kinerja instansi daerah, khususnya yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini penting untuk memastikan program yang didanai oleh Pemerintah Pusat dijalankan dengan baik di tingkat daerah.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat keterbatasan jurnal pendukung mengenai kinerja non keuangan dikarenakan masih sedikitnya penelitian terkait penelitian tersebut.
2. Hasil penelitian terkait kinerja keuangan hanya dilakukan dalam waktu tiga tahun periode yaitu tahun 2020-2022.

3. Terdapat keterbatasan informan mengenai kepuasan masyarakat. Informan dengan latar belakang konsultan konstruksi yang diwawancarai hanya dilakukan wawancara dengan satu perusahaan saja.

#### **D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, penulis menyarankan beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari jurnal pendukung internasional mengenai kinerja non keuangan instansi pemerintah.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian menjadi 5 hingga 8 tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara lebih dari satu perusahaan konsultan konstruksi dan dapat mewawancarai kontraktor di Kabupaten Bogor.